Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022.

Christopher Ezra Manurung; Christy Zee; Nicholas Nathanael; Ryan Ernando,
Universitas Pradita, christy.zee@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: This study aims to analyze the history of the development of democracy in Indonesia to reflect on history. Democracy is a political system that aims to maintain the political stability of a country. In Indonesia itself, the democratic system has undergone many changes since the beginning of independence until 2022. In each of these developments, there have been many historical events that have been quite detrimental. Therefore, it is very important to study the history of democracy, as well as analyze the things that can be used as lessons for society. By researching the development of democracy, the public can support the development of democracy in 2022. This research is qualitative in nature using the observation method of journals and the internet. The results showed that there were 4 periods of democracy: (1) Parliamentary Democracy, (2) Guided Democracy, (3) Pancasila Democracy in the New Order Era, and (4) Pancasila Democracy in the Reformation Era. In 2022, the democracy assessment index is considered to be more advanced. There are 5 sections that serve as a reference for assessing the quality of democracy in Indonesia. The part that has the best development is the aspect of government functions. From the results of the analysis, it can be concluded that the development of democracy in Indonesia, especially at the beginning of independence, experienced ups and downs which led to several conflicts. Democracy that has been implemented until now is the era of reform because it has a balance between liberal and communist ideologies. Understanding the concept and history of democracy in Indonesia can make people aware of supporting the development of democracy in 2022.

KEYWORDS: Development of Democracy, New Order, Old Order, Reformation, Pancasila

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia untuk melakukan refleksi sejarah. Demokrasi merupakan sistem politik yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik suatu negara. Di Indonesia sendiri, sistem demokrasi telah mengalami banyak perubahan sejak awal kemerdekaan hingga tahun 2022. Pada setiap perkembangan tersebut, terdapat banyak peristiwa bersejarah yang cukup merugikan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mempelajari sejarah demokrasi, serta menganalisis hal-hal yang dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat. Dengan meneliti tentang perkembangan demokrasi, masyarakat dapat mendukung perkembangan demokrasi di tahun 2022. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode observasi terhadap jurnal dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 periode demokrasi: (1)Demokrasi Parlementer, (2)Demokrasi Terpimpin, (3)Demokrasi Pancasila Era Orde Baru, dan (4)Demokrasi Pancasila Era Reformasi. Di tahun 2022, indeks

penilaian demokrasi dinilai semakin maju. Terdapat 5 bagian yang menjadi acuan penilaian kualitas demokrasi di Indonesia. Bagian yang memiliki perkembangan paling baik adalah aspek fungsi pemerintahan. Dari hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya pada awal kemerdekaan, mengalami naik-turun yang menyebabkan beberapa konflik. Demokrasi yang tetap diterapkan hingga kini adalah era reformasi karena memiliki keseimbangan antara ideologi liberal dan komunis. Memahami konsep dan sejarah demokrasi di Indonesia dapat menyadarkan masyarakat dalam mendukung perkembangan demokrasi tahun 2022.

KATA KUNCI: Perkembangan Demokrasi, Orde Baru, Orde Lama, Reformasi, Pancasila.

I. PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat wilayah, masyarakat, dan pemerintah (Ramadan, 2020). Negara dikatakan suatu organisasi karena diantaranya ada struktur seperti presiden yang didukung oleh wakil presiden dan para menteri. Terbentuknya suatu bangsa memerlukan tiga syarat utama: wilayah, masyarakat, dan pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem atau bentuk pemerintahannya sendiri. Bentuk pemerintahan termasuk oligarki, anarki, kerusuhan, kediktatoran, dan demokrasi.

Dalam kehidupan bernegara, suatu negara sangat membutuhkan suatu sistem pemerintahan, agar dapat diarahkan, dan menjadi jalan yang umum bagi seluruh rakyat. Sistem pemerintahan sendiri memiliki berbagai jenis, sesuai dengan kebutuhan tiap negara. Sistem pemerintahan yang sering dianut dan paling umum digunakan adalah sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi sendiri muncul pertama kali pada zaman Yunani Kuno, dimana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah (Subroto, 2022). Sistem pemerintahan ini muncul karena masyarakat ingin membebaskan diri dari ideologi feodalisme yang dinilai tidak seimbang dalam pembagian kekuasaan. Instansi-instansi pemerintahan kemudian dibagi-bagi sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki untuk mendukung berjalannya sistem demokrasi. Dari Yunani, sistem ini kemudian mulai diterapkan di negara-negara Eropa, serta negara-negara lainnya hingga kini. Salah satu negara yang menerapkan prinsip demokrasi dalam kurun waktu lama adalah Republik Indonesia. Aspinall (2004) menyatakan bahwa Indonesia sedang mengalami saat yang demokratis.

Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketataan republik indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi (pasang surut). Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural (Astuti, 2020).

Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaannya sebagai ideologi negara mempunyai banyak makna dan nama, hal ini disebabkan karena banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah menjadi obsesi masyarakat di dunia (Intan, 2017). Dengan diterapkannya nilai-nilai serta sistem demokrasi dalam negara, stabilitas dalam berbagai bidang dapat tercapai. Kehidupan warga negara juga lebih terjamin dan sejahtera. Hal yang menjadi masalah adalah nilai-nilai ini mulai pudar dalam masyarakat akibat munculnya era globalisasi.

Meneliti perkembangan demokrasi memiliki berbagai manfaat bagi tim penulis dan pembaca. Dengan mempelajari perkembangan demokrasi, masyarakat dapat melakukan refleksi sejarah serta memahami kelebihan kekurangan dari setiap prinsip demokrasi yang sudah diterapkan di masa lalu. Masyarakat juga bisa membantu sebagai pendukung dalam perkembangan demokrasi di tahun 2022. Oleh sebab itu, dalam jurnal ini, tim penulis akan membahas tentang sejarah “Perkembangan Demokrasi di Indonesia”. Penelitian diharapkan dapat menjadi refleksi sejarah. Pembahasan hasil kajian pustaka akan menjelaskan bagaimana sistem demokrasi berkembang, ciri-ciri pada setiap periode, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan tim penulis adalah metode kualitatif dengan melakukan kajian pustaka terhadap jurnal dan *website-website* internet terpercaya. Analisis yang dilakukan fokus pada perkembangan demokrasi serta peristiwa yang terjadi di setiap periode.

Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk mempelajari, menemukan, menjelaskan, dan mendeskripsikan kualitas atau karakteristik dampak sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif.

Sementara itu, kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang

pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku ataupun jurnal (Pohan, 2007:42).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilansir dari artikel yang ditulis dalam *Kompas.com* (Gischa, 2022), Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu kebebasan, karena hanya melalui kebebasan, setiap warga negara bisa saling membagi kekuasaannya. Istilah demokrasi juga berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *kratos* yang berarti kekuasaan rakyat (Boby, 2021). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa demokrasi merupakan kekuasaan yang dimiliki serta diatur oleh masyarakat. Tujuan diterapkannya demokrasi adalah untuk mencapai keputusan yang menguntungkan masyarakat. Diputuskan oleh rakyat, dijalankan oleh rakyat, serta dinikmati oleh rakyat. Meskipun memiliki prinsip yang efektif, penerapannya di berbagai negara, salah satunya Indonesia, masih memiliki beberapa kekurangan dalam berbagai aspek. Hal ini tentu menyebabkan beberapa penyimpangan serta peristiwa yang menjadi luka bagi bangsa dan negara.

Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada abad ke-20, setelah menyatakan kemerdekaan. Sesuai dengan informasi yang dirangkum pada detik.com (Mawardi, 2022), berikut merupakan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia:

A. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Menurut Mawardi dalam detik.com (2022), Demokrasi Parlementer merupakan konsep pemerintahan di suatu negara yang memberikan otoritas kepada parlemen untuk mengerjakan tugas-tugas negara. Sistem demokrasi parlementer cenderung mengikuti demokrasi liberal.

Berikut merupakan ciri-ciri demokrasi parlementer (Putri, 2022):

1. Sistem multi partai diterapkan dan sangat banyak partai yang berkembang saat itu.
2. Sistem pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, dan presiden dijadikan sebagai kepala negara.

3. Lembaga legislatif memiliki kekuatan di atas eksekutif, sehingga dapat menurunkan lembaga eksekutif. DPR bisa menurunkan kabinet dengan mosi tidak percaya.
4. Pemilihan presiden dilaksanakan secara konsensus/voting. Pemilu pertama dilaksanakan pada 1955 dan diikuti oleh lebih dari 30 partai politik.
5. Menteri atau kabinet bertanggung jawab terhadap DPR.

Dilansir dari tirto.id (Prinada, 2021), tokoh-tokoh Indonesia yang menganggap bahwa demokrasi parlementer penting diterapkan adalah Moh.Hatta dan Sutan Syahrir. Moh.Hatta mencetuskan bahwa kedaulatan seharusnya berada ditangan rakyat. Oleh karena itu, pemilu dan musyawarah diterapkan dalam sistem pemerintahan. Karena masih belum ada ketentuan atau persetujuan mengenai periodenya, pemilu yang dilaksanakan menjadi tidak konsisten dan seringkali mengalami perubahan.

Demokrasi parlementer disebut-sebut sebagai demokrasi yang mencapai kejayaan dibanding demokrasi lainnya. Akan tetapi, masa demokrasi hanya berjalan selama kurang lebih 9 tahun. Demokrasi parlementer dianggap gagal dan berhenti diterapkan karena 3 alasan (Ratna, 2016).

Pertama, munculnya dekrit presiden pada tanggal 9 Juli 1959 yang dikeluarkan karena presiden menganggap demokrasi parlementer tidak menerapkan nilai-nilai kepribadian Indonesia, salah satunya gotong royong. Presiden bermaksud menciptakan suatu sistem politik dimana semua sifat politik dapat diterapkan, termasuk komunisme. Di dalam dekritnya, presiden juga membubarkan badan konstituante karena dianggap gagal melaksanakan tugas. Tugas yang dimaksud adalah rancangan UUD dan mencegah konflik antar partai.

Kedua, penentuan ideologi yang masih rancu. Badan konstituante mengadakan voting, namun tetap tidak dapat menarik kesimpulan ideologi apa yang harus digunakan.

Terakhir, terlalu banyak partai politik sehingga mendominasi pemerintahan. Hal ini menyebabkan konflik yang tak terkendali serta

dampak-dampak negatif lainnya. Kestabilan politik di Indonesia menjadi terganggu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa demokrasi terpimpin memiliki kebijakan dan pemerintahan yang baik, karena diterapkannya prinsip kedaulatan rakyat, namun pembagian kekuasaan masih kurang stabil sehingga menyebabkan legislatif berada di atas eksekutif. Pemilihan umum yang tidak konsisten juga menyebabkan labilnya sistem pemerintahan, serta terlalu banyak partai politik yang terbentuk hingga sulit menghindari aliran politik labil.

B. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi terpimpin muncul akibat dekrit presiden pada 9 Juli 1959. Lewat dekrit yang dikeluarkan Ir. Soekarno, badan konstituante dibubarkan dan UUDS 1950 digantikan kembali pada UUD 1945. Oleh karena itu, kekuasaan presiden kini kembali mendominasi. Segala bentuk kebijakan maupun wewenang dipusatkan pada satu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin juga kerap kali disebut sebagai Demokrasi pemerintahan tunggal. Sebab itu, ciri khas dari masa ini adalah kehadiran dari Sang Presiden sebagai pemimpin pemerintahan (Wahyuni, 2022).

Tujuan utama diterapkannya sistem demokrasi terpimpin adalah untuk memperbaiki stabilitas politik dan menaikkan peran presiden sebagai kepala negara, juga kepala pemerintahan. Bertolak belakang dengan demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin justru cenderung menyerap ideologi komunisme dalam sistemnya (Mawardi, 2022). Pada masa ini, ideologi Nasakom (Nasionalisme, agama, komunisme) juga dibentuk dengan tujuan mempersatukan pemahaman masyarakat mengenai hidup berbangsa dan bernegara.

Seiring berjalannya waktu, ideologi yang semakin mengental adalah komunisme. Menyebabkan berbagai pertentangan serta konflik, terutama bagi kaum yang menganut Marxisme atau ideologi lain. Akibatnya, terjadi banyak penyelewengan nilai-nilai Pancasila (Wahyuni, 2022):

1. TAP MPRS No.III/MPRS/1963 menyatakan Ir. Soekarno menjadi presiden seumur hidup.

2. DPR dibubarkan berdasarkan hasil pemilu oleh presiden.
3. Ketua DPR Gotong Royong/MPRS diangkat sebagai menteri negara oleh presiden.
4. DPA menetapkan GBHN (bersumber dari pidato presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul 'Penemuan Kembali Revolusi Kita', bukan MPRS).

Demokrasi terpimpin berhenti diterapkan di sekitar tahun 1965, akibat pergerakan G30S/PKI. Hal ini dikarenakan sistem pemerintahan yang condong ke komunis mendukung perkembangan PKI sehingga terjadi pemberontakan. Tujuan partai PKI adalah untuk menjadikan Negara Indonesia menganut ideologi komunis seutuhnya. Alhasil, beberapa tentara tewas mengenaskan dan beberapa diculik untuk kemudian dibunuh di Lubang Buaya. Peristiwa ini tentu berdampak buruk pada pemerintahan. Ir. Soekarno kemudian meminta Jenderal Soeharto untuk menghapus komunisme dalam sistem pemerintahan, atas desakan rakyat (Aziza, 2022).

Soeharto menjalankan perintah. PKI kini dinyatakan sebagai organisasi terlarang akibat kejadian tersebut. Tetapi, dampak dari kejadian tersebut masih membekas di masyarakat. Kekuatan Soekarno sebagai presiden semakin melemah. Soekarno kemudian mengirimkan surat pada Soeharto untuk memberikan jabatannya. MPRS kemudian memberikan mandat kepada Soeharto untuk menjadi presiden, untuk menjaga stabilitas pemerintahan di Indonesia. Dengan begitu, era demokrasi terpimpin berakhir digantikan oleh demokrasi pancasila yang dibawa oleh Presiden Soeharto.

Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep yang dibawakan oleh Ir. Soekarno pada awalnya adalah untuk menyatukan semua sifat politik serta mempersatukan masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai pancasila. Namun, penerapan yang terjadi tidak sesuai. Beliau justru melakukan beberapa pelanggaran nilai pancasila sehingga menyebabkan terjadinya berbagai konflik. Salah satunya yang paling fatal adalah PKI yang semakin kuat seiring pemerintahan condong ke arah komunis. Demokrasi Terpimpin diakhiri dengan peristiwa G30S/PKI dan penyerahan jabatan kepada Soeharto.

C. Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1965-1998)

Setelah peristiwa G30S/PKI dan penyerahan jabatan kepada Soeharto, demokrasi pancasila era orde baru mulai diterapkan. Sesuai dengan namanya, era ini menjadikan pancasila sebagai dasar dari sistem pemerintahan. Pada masa ini, Soeharto beserta pasukan yang dibentuknya berhasil membubarkan PKI. Tidak hanya dibubarkan, namun setiap orang yang merupakan anggota PKI, maupun dianggap berhubungan dengan PKI akan langsung dieksekusi di tempat. Akibatnya, 500 ribu hingga 3 juta orang tewas dibantai.

Penyimpangan lain juga masih terjadi pada masa itu. Dilansir dari detik.com (Mawarni, 2022), berikut merupakan penyimpangan-penyimpangan di era orde baru:

1. Penyelenggaraan pemilu tidak jujur maupun adil.
2. Penegakan kebebasan politik untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil).
3. Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) dianggap tidak dapat berdiri sendiri sebab para hakim merupakan anggota PNS Departemen kehakiman.
4. Jaminan kebebasan mengemukakan pendapat masih sangat kurang.
5. Sistem kepartaian terkesan otonom dan berat sebelah.
6. Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) semakin meluas dan menimbulkan berbagai dampak negatif.

Demokrasi pada masa ini memang memiliki dasar Pancasila, namun penerapannya masih kurang sehingga menyebabkan berbagai penyimpangan. Orde baru diakhiri dengan krisis moneter yang terjadi akibat dampak dari krisis ekonomi di negara-negara Asia lainnya. Terjadi inflasi di berbagai daerah serta KKN yang semakin besar. Masyarakat yang tak terima kemudian melakukan demonstrasi di berbagai tempat, salah satunya adalah mahasiswa-mahasiswa Trisakti. Pada 12 Mei 1998, 4 Mahasiswa Trisakti tewas tertembak akibat demonstrasi yang dilakukan di daerah tersebut. Kematian empat orang yang kini dianggap sebagai pahlawan reformasi kemudian semakin memancing amarah masyarakat. Demonstrasi dan kekacauan terjadi dimana-mana, memaksa Soeharto untuk mengundurkan diri dari

jabatannya. Dengan kemunduran Presiden Soeharto, demokrasi pancasila era orde baru juga berhenti diterapkan (Prayitno, 2019).

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan demokrasi di orde lama (terpimpin) dan orde baru masih memiliki kemiripan. Pemerintahan yang dijalankan masih otoriter dan belum sepenuhnya stabil.

D. Demokrasi Era Reformasi (1998-sekarang)

Dengan berakhirnya rezim 32 tahun dan turunya Soeharto, era orde baru digantikan oleh era reformasi. B.J. Habibie menggantikan Soeharto dan menerapkan reformasi. Sebagai presiden selanjutnya, Habibie berhasil menciptakan era reformasi serta perkembangan secara besar-besaran di berbagai sektor. Dalam bidang pers misalnya, pada era Habibie diterbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Kompas, 2022).

Demokrasi era reformasi menerapkan nilai-nilai pancasila didalamnya. Mirip dengan demokrasi parlementer, tetapi sudah dikembangkan lebih baik lagi. Kebebasan pers dan sistem multi partai kembali diterapkan. Pemilu lebih demokratis dan konsisten karena sudah ditentukan dalam amandemen UUD 1945 seiring waktu. Pembagian kekuasaan antar lembaga juga lebih stabil dibandingkan demokrasi-demokrasi sebelumnya. Hak-hak warga negara lebih terjamin dan kembali menerapkan prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat. Diskriminasi SARA juga berhasil diatasi oleh B.J.Habibie dalam masa pemerintahannya.

Ada beberapa tindakan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan di era reformasi. Berikut merupakan beberapa perubahan signifikan berdasarkan artikel yang dibawakan oleh Utami:

1. MPR mengadakan sidang istimewa pada tanggal 10-13 November 1998. Tujuannya untuk membahas strategi reformasi yang akan dilakukan pada setiap bidang. Lewat sidang ini, 12 TAP MPR dirilis.
2. Pelaksanaan otonomi daerah dan sistem pemilu secara demokratis. Pembagian hasil eksplorasi, eksploitasi, serta

wewenang diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan pusat dan daerah.

3. Pembatasan partai politik dicabut supaya kebebasan berpolitik dapat kembali tercipta dalam masyarakat. Meskipun jumlah partai kembali meningkat pesat, partai politik yang diverifikasi untuk mengikuti pemilu tetap dibatasi.
4. Dwifungsi ABRI dihapuskan secara perlahan untuk memfokuskan tugas ABRI dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bagian-bagian di dalam ABRI dipisahkan sesuai dengan divisi masing-masing dan jumlah anggota dikurangi. Kini, ABRI dikenal dengan nama TNI (Tentara Nasional Indonesia).
5. Pemilu kembali diselenggarakan dengan periode waktu yang telah ditentukan. Tujuan awalnya hanya untuk memilih partai politik. Namun, pada tahun 2004, pemilu juga diterapkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

Gerakan reformasi banyak mencapai keberhasilan pada masa pemerintahan B.J.Habibie. Akan tetapi, B.J.Habibie hanya menjabat satu tahun akibat kehilangan Timor Timur dan desakan dari masyarakat. Bagaimanapun, demokrasi era reformasi yang dirintis olehnya masih diterapkan hingga sekarang.

Perkembangan demokrasi di Indonesia memakan waktu yang cukup panjang, lantaran menjaga stabilitas politik tidaklah mudah. Meskipun era reformasi dianggap sudah cukup memenuhi kebutuhan dan aspirasi rakyat, penerapan demokrasi tidak akan pernah berhenti berkembang. Untuk memastikan perkembangan penerapan sistem demokrasi dijalankan dengan baik, refleksi sejarah perlu dilakukan. Dengan melakukan refleksi sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, rakyat dapat memahami unsur-unsur yang menjadi titik lemah maupun kekuatan dari setiap sistem demokrasi yang diterapkan pada periode-periode tertentu.

Dilansir dari artikel singkat yang ditulis oleh Tim Kemdikbud (2015), demokrasi tidak hanya sekedar bentuk pemerintahan dan sistem politik tetapi juga pola hidup demokratis baik dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara. Oleh sebab itu, mempelajari proses

perkembangan demokrasi serta refleksi sejarah sangatlah penting bagi setiap individu. Masyarakat yang mempelajari sistem demokrasi dapat menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, setiap individu dapat mendukung jalannya pemerintahan serta sistem politik yang demokratis.

Kehidupan masyarakat yang demokratis tentu memberikan berbagai manfaat bagi bangsa dan negara. Lingkungan hidup warga negara akan menjadi positif dan damai. Secara tidak langsung, menyejahterakan kehidupan warga negara. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai demokratis dapat memberikan banyak manfaat.

Kondisi demokrasi pada era kini, yakni tahun 2021-2022, tercatat mengalami kemajuan dari segi indeks penilaian. Dilansir dari berita yang ditulis oleh Trihusodo (2022), indeks demokrasi bertengger naik pada peringkat 52, dengan kisaran 6,30-7,03. Sistem penilaian ditentukan berdasarkan 5 faktor, yaitu proses pemilu, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan serta partisipasi politik, dan politik budaya. Bagian yang mengalami perkembangan paling baik adalah penerapan fungsi pemerintahan. Dengan penerapan fungsi pemerintahan yang baik, Indonesia dapat memperkuat stabilitas politik dan bidang lainnya.

Dengan mempelajari tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, tim penulis kini dapat memahami bahwa menyusun suatu sistem pemerintahan yang mampu mengelola berbagai bidang tidaklah mudah. Diperlukan perhatian terhadap beberapa aspek, pencegahan konflik secara internal maupun eksternal, serta menyatukan masyarakat dalam ideologi Pancasila. Setiap periode demokrasi yang diterapkan memiliki kelebihan serta kekurangan tersendiri. Sejauh ini pada tahun 2022, sistem demokrasi di Indonesia berkembang semakin baik. Sistem pemilu sudah diterapkan dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat. Pembagian wewenang baik di pusat maupun daerah memiliki struktur yang baik dan merata. Untuk mendukung perkembangan demokrasi semakin condong ke arah yang lebih baik, peran masyarakat dibutuhkan. Hal itu dikarenakan sistem demokrasi yang kini dianut adalah sistem demokrasi Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama pada awal kemerdekaan, mengalami naik-turun yang menyebabkan berbagai konflik. Dimulai dari munculnya demokrasi parlementer yang memiliki dasar prinsip baik, namun penerapannya masih kurang. Kemudian demokrasi terpimpin menggantikan demokrasi parlementer karena dekrit presiden 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan yang condong ke arah komunis menyebabkan PKI sempat melakukan pemberontakan dan Soekarno digantikan oleh Soeharto. Demokrasi pancasila era orde baru kemudian dilaksanakan selama kurang lebih 32 tahun. Dikarenakan stabilitas negara yang menurun, era reformasi kemudian dilakukan dan dipelopori oleh B.J.Habibie.

Mempelajari perkembangan demokrasi di Indonesia, menerapkan nilai-nilai demokratis, serta melakukan refleksi sejarah merupakan hal-hal yang penting bagi warga negara karena dapat memberikan dampak yang positif. Dengan demikian, menganalisis lebih dalam mengenai sejarah setiap periode dalam perkembangan demokrasi perlu dilakukan. Memahami konsep dan sejarah demokrasi di Indonesia dapat menyadarkan masyarakat dalam mendukung perkembangan demokrasi tahun 2022.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, N. F. (2020, November 3). *Macam-macam Demokrasi di Indonesia, dari Parlementer hingga Pancasila | merdeka.com*. Merdeka. Retrieved November 17, 2022, from <https://www.merdeka.com/jabar/macam-macam-demokrasi-di-indonesia-dari-parlementer-hingga-pancasila-kln.html>
- Aziza, C. (2022, September 30). *30 September 1965: Mengenang peristiwa G30S/PKI*. Elshinta.com. Retrieved November 1, 2022, from <https://elshinta.com/news/280559/2022/09/30/30-september-1965-mengenang-peristiwa-g30spki>
- Boby, A. (2021, November 2). *Demokrasi – TBNews Polda Kepri*. TBNews Polda Kepri. Retrieved November 17, 2022, from <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/11/02/demokrasi/>
- Gischa, S. (2022, July 7). *Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli Halaman all*. Kompas.com. Retrieved November 17, 2022, from <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/07/180000169/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-?page=all>
- Intan, R. (2017, October 25). *PEMIKIRAN JIMLY ASSHIDDIQIE TENTANG DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH - Raden Intan Repository*. Raden Intan Repository. Retrieved November 17, 2022, from <http://repository.radenintan.ac.id/1664/>
- Kompas. (2022, February 19). *Profil BJ Habibie, Presiden Ketiga dan Tersingkat dalam Sejarah RI*. Kompas.com. Retrieved November 1, 2022, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/19531891/profil-bj-habibie-presiden-ketiga-dan-tersingkat-dalam-sejarah-ri>
- Mawardi, R. A. (2022, May 30). *Demokrasi Parlementer: Ciri-ciri hingga Sejarahnya di Indonesia*. Detikcom. Retrieved November 1, 2022, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6101990/demokrasi-parlementer-ciri-ciri-hingga-sejarahnya-di-indonesia>
- Mawardi, R. A. (2022, August 19). *Sejarah Demokrasi di Indonesia dan Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Detikcom. Retrieved November 1, 2022, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa>

- Pohan, R. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Ar-Rijal Institute dan Lanarkka Publisher.
- Prayitno, T. (2019). *Berakhirnya Orde Baru dan Lahirnya reformasi*. Sumber Belajar Kemdikbud. Retrieved November 1, 2022, from https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/repos/FileUpload/Akhir%20Orba%20&%20Reformasi%20_gugun/Berakhirnya-Orde-Baru-dan-lahirnya-reformasi.html
- Prinada, Y. (2021, February 26). *Sejarah Demokrasi Parlementer: Ciri-ciri, Kekurangan, & Kelebihan*. Tirto.ID. Retrieved November 1, 2022, from <https://tirto.id/sejarah-demokrasi-parlementer-ciri-ciri-kekurangan-kelebihan-gaC3>
- Putri, V. K. M. (2022, May 27). *Ciri-ciri Demokrasi Parlementer*. Kompas.com. Retrieved November 1, 2022, from <https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/27/100000769/ciri-ciri-demokrasi-parlementer>
- Ramadan, I. (2020). *Indonesia Adalah Negara Demokrasi*. *Indonesia Adalah Negara Demokrasi*. <https://osf.io/7d6fj/download>
- Ratna, D. (2016, April 11). *Kenapa demokrasi parlementer mengalami 'kegagalan'?* | *merdeka.com*. Merdeka.com. Retrieved November 1, 2022, from <https://www.merdeka.com/pendidikan/kenapa-demokrasi-parlementer-mengalami-kegagalan.html>
- Utami, S. N. (2022, Oktober 27). *Home*. YouTube. Retrieved November 19, 2022, from https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/skola/read/2022/10/27/083000669/perkembangan-politik-pada-masa-reformasi?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIACA%3D%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16688661011808&referrer=https%3A%2F%2Fw
- Wahyuni, W. (2022, March 22). *Periode Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia*. Hukumonline. Retrieved November 1, 2022, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/periode-sistem-pemerintahan-demokrasi-terpimpin-di-indonesia-lt6239a34782507>
- Subroto, L. H. (2022, February 12). *Lahirnya Demokrasi di Negara-negara Dunia Halaman all*. Kompas.com. Retrieved November 29, 2022, from

<https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/12/140000879/lahirnya-demokrasi-di-negara-negara-dunia?page=all>

Trihusodo, P. (2022, February 18). *Indonesia.go.id - Kehidupan Demokrasi Indonesia 2021 Mengalami Kemajuan*. Portal Informasi Indonesia.

Retrieved November 29, 2022, from

<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4194/kehidupan-demokrasi-indonesia-2021-mengalami-kemajuan>